

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. UII Press:Jakarta. 2004.
- Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika:Jakarta. 2011.
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika:Jakarta 2009.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta. 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo:Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika:Jakarta. 2005.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta:Jakarta. 2010
- Diana Halim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia:Jakarta. 2004
- Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral Dan BatuBara Di Indonesia*. Rineka Cipta:Jakarta. 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka:Jakarta. 1996
- Nandang Sudrajat. *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Pustaka Yustisia:Yogyakarta. 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group:Jakarta. 2005.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia:Jakarta. 1983.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta. 2011.
- Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada:Jakarta. 2006.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika:Jakarta. 2010.
- Wisnu Arya Wardhana. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Penerbit Andi:Yogyakarta. 2004.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pengawasan terhadap usaha-usaha tambang.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.